

PARTAI POLITIK DAN KADERISASI
(Membentuk Partai Politik yang Berkualitas Sesuai dengan Tuntutan
Demokrasi)

Agus Nurulsyam Suparman¹ Gilang Yuniar Rahman²
FISIP-Universitas Galuh Ciamis
e-mail: agusnurulsyams@gmail.com

ABSTRAK

Harapan awal dari banyaknya partai politik akan menimbulkan perubahan yang signifikan atas masa depan yang lebih baik, melalui potensi untuk kesadaran kolektif yang dibangun atas dasar partisipatoris, ternyata berbeda dengan kenyataannya. Partai politik masih tetap saja tidak dapat keluar dari fragmatisme dan bayang-bayang perebutan kekuasaan dan kerap mengangkat tema ideologis untuk tujuan-tujuan praktis yang terkadang tidak berkaitan sama sekali dengan tujuan reformasi. Ketatnya kompetisi antar partai politik dalam memperoleh dukungan dan membentuk basis massa telah memberikan membuat kecenderungan suatu partai politik untuk membiaskan ideologinya agar dapat diterima dan mendapatkan massa simpatisan. Namun pada konteks ini justru partai politik terjebak oleh pengaruh oligarki yang semakin menguat didalam tubuh partai politik itu sendiri.

Kata Kunci : *Demokrasi, Partai Politik, dan Ideologi.*

A. Pendahuluan

Di era pemerintahan demokrasi saat ini, peran dan keterlibatan masyarakat untuk berkontribusi menjalankan roda pemerintahan merupakan parameter utama yang dapat dilihat sebagai sebuah tatanan kekuasaan yang bermartabat. Sejarah panjang mencatat tentang perjalanan kekuasaan di negeri ini, senantiasa tidak lepas dari kehadiran demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang diharapkan dapat menciptakan keseimbangan, keselarasan dalam membangun interaksi sosial politik, baik antara pemerintahan dengan masyarakat, eksekutif dengan legislatif

atau antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan politik.

Secara konsepsi demokrasi dapat dimaknai sebagai tatanan kekuasaan yang berprinsip bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Selanjutnya dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokrasi titik sentralnya terletak pada parlemen yang merupakan perwujudan dari perwakilan rakyat atau masyarakat. Sehingga harus dipastikan bahwa masyarakatlah sebagai pemegang kedaulatan yang ditunjang dengan struktur untuk berpartisipasi dalam politik, agar dapat menentukan haknya untuk memilih pimpinan, menentukan kebijakan dalam mewujudkan cita-citanya.

Selanjutnya, dalam menunjang pemerintahan yang demokratis selain adanya struktur dalam politik, maka harus ditunjang pula dengan infrastruktur politik yang meliputi partai politik (*political party*), kelompok gerakan (*movement group*), dan kelompok kepentingan atau kelompok penekan (*pressure/interest group*) yang berperan sebagai sarana untuk masyarakat dalam menumbuhkan kehidupan berpolitik. Dari ketiga infrastruktur politik tersebut, yang dipandang memiliki legitimasi dalam membentuk landasan demokratis masyarakat, terletak pada partai politik. Karena, partai politik sebagai suatu organisasi formal yang berbadan hukum dan diakui oleh undang-undang.

Selama ini, kedudukan partai politik di negara-negara yang menganut sistem demokrasi dipandang sebagai wadah bagi masyarakat yang akan menjadi perwakilan rakyat untuk duduk di parlemen. Sebagaimana menurut Sahid (2011) partai politik secara umum diartikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Meskipun partai politik pertamanya lahir di negara-negara Eropa Barat sebagai manifestasi atas

meluasnya gagasan bahwa rakyat harus diikutsertakan di dalam proses politik. Namun apabila melihat pada latar belakang sejarah tentang kemunculan partai politik, bangsa Indonesian sebenarnya sudah sejak lama mengenal partai politik.

Bahkan sejak zaman kolonial partai politik telah ada dan menjadi wadah bagi masyarakat untuk melakukan pergerakan (wadah perjuangan) dalam rangka menimbulkan kesadaran nasional yang tujuannya mencapai kemerdekaan. Sementara ditahap perkembangannya, partai politik di Indonesia terus mengalami perubahan, diawali dari organisasi pergerakan sebagai wadah perjuangan politik masyarakat dalam mencapai kemerdekaan, hingga menjadi mesin politik massa yang terorganisir untuk memperoleh kekuasaan politik, merebut kedudukan politik dan bahkan menjalankan kekuasaan politik. Sejak awal kemerdekaan partai politik diberikan kesempatan yang seluas-luasnya oleh pemerintah untuk mengembangkan nilai-nilai di masyarakat.

Hal ini, dibuktikan dengan diselenggarakannya pemilihan umum yang pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante yang diikuti oleh 29 partai politik. Pada pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1955 telah melahirkan kekuatan 4 partai politik besar yang berhasil mendapatkan dukungan dari

masyarakat untuk menduduki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante, yaitu : Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Masyumi, Nahdatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dengan diselenggarakannya pemilihan umum pertama tahun 1955 dipandang sebagai cikal bakal terbentuknya sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Semenjak pemilu pertama berhasil dilaksanakan, kehidupan politik cenderung berkembang sesuai dengan tuntutan dan situasi rejim yang berkuasa. Partai politik mengalami pasang surut seiring dengan pergantian sistem politik dan sistem kepartaian yang berlaku di negeri ini.

Pada perkembangan selanjutnya, pasca terjadinya reformasi dengan runtuhnya rezim pemerintahan Soeharto di tahun 1998, kehidupan partai politik mulai mengalami tumbuh kembang kembali seperti pada awal kemerdekaan, dikarenakan demokratisasi ketika masa rezim pemerintahan Soeharto hanyalah kamufase dari sistem pemerintah otoriter yang membatasi dan mengkerdulkan power partai politik agar senantiasa dapat dikendalikan dan dimonopoli oleh satu kekuatan besar yang berorientasi pada pelanggaran kekuasaan di pemerintahan. Akan tetapi semangat reformasi telah memberikan ruang dan celah bagi para pelaku politik untuk kembali merepleksikan kekuatan-kekuatan

politik yang sempat pudar sebagai perwujudan dari mengutunya demokrasi.

Fenomena tumbuh kembangnya partai politik pasca reformasi tahun 1998 tentunya memiliki karakter dan perjalanan tersendiri, sehingga dapat dipandang sebagai paradigma baru dalam kehidupan masyarakat. Kedudukan dan posisi partai politik dimasa setelah reformasi, tidak hanya metafora partai politik masa lalu yang berorientasi pada masalah kekuasaan (*power*) akan tetapi mulai menyesuaikan dengan isu dan tuntutan masyarakat, yang mengedepankan tentang nilai-nilai kebaikan umum, utilitarianisme (kemanfaatan), gender dan perjuangan atas hak-hak minoritas. Kendati masyarakat mengharapkan tentang adanya perwujudan partai politik yang moderen yang sesuai dengan tuntutan demokrasi, namun pada kenyataanya justru dengan terbukanya kebebasan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat terutama dalam kaitannya membentuk dan mendirikan partai politik telah menciptakanuforia politik dan berpotensi menimbulkan persaingan politik.

Munculnya berbagai partai politik dengan berbagai latar belakang dan identitas, senantiasa menawarkan ideologi dan tujuannya agar mendapatkan dukungan dan sekaligus membangun basis sosial politiknya yang justru mengarah pada perpecahan dan rawan terjadi konflik di masyarakat. Disamping itu, partai politik di era reformasi memiliki

kecenderungan untuk cepat berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan di masyarakat, karena dengan timbulnya persaingan untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat, tidak dapat dipungkiri untuk saling berlomba-lomba dalam membangun, mengumpulkan dan mengeksploitasi sumber daya politik yang ada di masyarakat.

Harapan awal dari banyaknya partai politik akan menimbulkan perubahan yang signifikan atas masa depan yang lebih baik, melalui potensi untuk kesadaran kolektif yang dibangun atas dasar partisipatoris, ternyata berbeda dengan kenyataannya. Di lain sisi, terdapat pola-pola baru dalam pendirian partai politik yang dianggap sebagai faktor penyebab menurunnya fungsi representatif dari partai politik, yaitu akibat dari adanya perpecahan di tubuh partai politik (konflik internal) dan ambisi dari tokoh-tokoh diluar partai politik yang merasa kecewa dengan partai politik yang sudah ada dengan membentuk atau mendirikan partai politik baru yang belum teruji secara elektabilitas, karena kurang memiliki kekuatan ideologis, politik dan institusional yang memadai didalam menjalankan peran strategis sebagai sebuah lembaga politik untuk menunjang kehidupan demokrasi.

Sementara sistem kepartaian yang berlaku saat ini mensyaratkan bahwa jumlah anggota partai sekurang-kurangnya harus mampu memenuhi quota sebesar 2,5% menduduki parlemen

sebagai hasil dari pemilihan umum, atau dikenal dengan mekanisme *parlementary threshold* yang secara tidak langsung mengarah pada pembatasan partai politik untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Hal itu, tentunya berimplikasi pada stabilitas dan eksistensi suatu partai politik. Dikarenakan agar suatu partai politik dapat tetap mempertahankan kedudukannya sebagai peserta pemilihan umum dimasa yang akan datang, sangat tergantung dan ditentukan oleh seberapa banyak anggota partai politik memperoleh suara atau dukungan dari masyarakat untuk dapat duduk diparlemen.

Ketatnya kompetisi antar partai politik dalam memperoleh dukungan dan membentuk basis massa telah memberikan membuat kecenderungan suatu partai politik untuk membiaskan ideologinya agar dapat diterima dan mendapatkan massa simpatisan. Namun pada konteks ini justru partai politik terjebak oleh pengaruh oligarki yang semakin menguat didalam tubuh partai politik itu sendiri. Rekrutmen dan kaderisasi partai politik dihadapkan dengan pragmatisme tentang mahalanya biaya penyelenggaraan demokrasi. Sehingga dalam hal ini, partai politik berkecenderungan untuk mencari dan memilih kader berdasarkan kekuatan modal.

Dengan adanya hal tersebut, partai politik seolah menjadi menjelma menjadi perusahaan bagi para pemilik modal untuk memperoleh kekuasaan. Pemilik modal seolah berada pada

kasta tertinggi dalam tubuh partai politik, karena meskipun tanpa melalui proses kaderisasi yang jelas tetapi dapat dengan mudah menduduki posisi strategis dan sekaligus mempengaruhi struktur partai politik dengan memasukan anggota keluarga atau kerabat (*patron-klien*) menjadi kader partai guna memperkuat posisi atau kedudukan yang berkecenderungan membentuk *dinasty* politik.

Penguasaan keluarga atau kerabat (*patron-klien*) dan pemilik modal dalam struktur partai politik menandakan bahwa kaderisasi sebagai bagian dari salah satu fungsi partai politik, yaitu berhubungan dengan rekrutmen untuk mengisi dan melakukan seleksi atas jabatan politik guna melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik dan didalam pemerintahan, kurang dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Partai politik hanya merupakan alat pencapaian kekuasaan yang dimainkan oleh sekelompok orang yang memiliki ambisi dan kepentingan pribadi serta terkesan tertutup bagi masyarakat secara umum. Fenomena tersebut, akhirnya menimbulkan meningkatnya ketidakpercayaan publik atas partai politik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada tulisan ini memunculkan satu pertanyaan kritis tentang bagaimana membentuk peran dan fungsi partai politik yang berkualitas sesuai dengan tuntutan masyarakat demokratis saat ini?

B. Pembahasan

a. Mengembalikan Kepekaan Partai Politik Sebagai Lembaga Politik Dari Sistem Demokrasi

Maksudi (2015) memberikan penjelasan bahwa dalam sistem politik demokrasi, rakyat diberikan ruang politik yang luas untuk dapat sungguh-sungguh menjalankan hak partisipasi politik yang bersifat otonom (*autonomus participation*), dan menjauhkan bentuk partisipasi yang dikerahkan (*mobilize participation*). Maksud dari ruang politik dalam hal ini dapat dipandang sebagai suatu tempat atau wadah bagi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan untuk mewujudkan cita-citanya dan menentukan arah serta tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan aktivitas politik.

Aktivitas politik masyarakat diberikan kesempatan secara luas untuk ikut berperan serta dalam menyampaikan ide-ide atau gagasan untuk menentukan nasib dari bangsa dan negaranya berdasarkan komitmen bersama. Melalui adanya kesempatan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik berarti menempatkan posisi masyarakat sebagai pemilik demokrasi dan bukan sebagai objek demokrasi. Berkenaan dengan hal itu, maka masyarakat diperkenankan untuk mengatur kehidupan politiknya dengan diberikannya hak untuk berkumpul dan berserikat oleh pemerintah, terutama dijinkannya untuk mendirikan partai politik selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Selama ini partai-partai politik yang berada di negara demokrasi memiliki orientasi untuk membentuk kekuasaan dalam pemerintahan dengan cara memenangkan pemilihan umum (pemilu). Partai politik senantiasa berkompetisi untuk meraih dukungan dan kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga politik yang menghubungkan antara masyarakat dengan sistem politiknya dengan menawarkan dan menjual ideologi politiknya sebagai suatu nilai-nilai yang dapat memberikan manfaat baik secara idiil maupun materil.

Namun pada kenyataannya kondisi tersebut berbanding terbalik dengan realitas sesungguhnya. Banyak diantaranya partai politik yang telah berhasil memenangkan suara rakyat dalam pemilihan umum yang demokratis dan berarti memperoleh jalan menuju kekuasaan baik di parlemen sebagai dewan perwakilan maupun di pemerintahan sebagai eksekutif tidak mampu memberikan kemanfaatannya bagi masyarakat secara umum, namun terjebak dengan dinamika politik praktis tentang bagaimana mekanisme dan prosedur politis untuk merebut kekuasaan yang dipandang sebagai suatu tradisi dalam berdemokrasi.

Partai politik setelah berada ditataran kekuasaan justru menjadi kehilangan orientasi ideologisnya sebagai nilai dasar perjuangannya untuk melakukan perubahan yang bermakna bagi masyarakat. Para elit partai yang berada di tataran kekuasaan

lebih cenderung sulit memisahkan antara memperjuangkan kepentingan umum dengan kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga para elit partai hanya sibuk dengan memperdebatan kekuasaan dari pada memikirkan harapan dan keinginan masyarakat. Kecenderungan yang seperti itu yang akhirnya memberikan dampak negatif berupa menurunnya elektabilitas partai politik di mata publik.

Secara umum partai politik telah kehilangan identitasnya sebagai suatu lembaga yang memperjuangkan hak-hak politik masyarakat, nilai ideologi hanya merupakan etalase (pajangan) yang tertuang dalam kertas yang dapat berubah setiap saat oleh desakan kepentingan kekuasaan.

Konsekuensi atau efek yang ditimbulkan dari adanya penurunan elektabilitas partai politik dapat memicu sikap apatis masyarakat dan dapat menodai esensi dari demokrasi itu sendiri. Sehingga mendorong melemahnya tatanan sosial sebagai kerangka kebersamaan yang akhirnya mengarah pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat didalam aktivitas politik dan pemilihan umum. Fenomena tersebut tentunya sebagai bentuk dari realitas yang inheren dalam kehidupan politik sebagai indikasi telah terjadinya pergeseran dari peran dan fungsi partai politik yang sudah tidak mampu dijalankan sesuai dengan amanat demokrasi.

Oleh karena itu, untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut agar tidak berkembang kearah hilangnya jati

diri partai politik, maka pola-pola yang berhubungan dengan persolan kekuasaan mulai diposisikan pada situasi dan kondisi tertentu, artinya terkait dengan urusan *power politic* yang selama ini kerap ditunjukkan oleh para elit partai politik dalam dinamika penyelenggaraan kekuasaan harus mulai dipisahkan dengan urusan pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Partai politik sudah seharusnya menerima gagasan dan alternatif yang mendorong perubahan untuk mengembalikan kepercayaan publik dengan melihat pada *socio-historis* masyarakat tentang suatu cita-cita dan harapan yang diperjuangkan dalam menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik.

Dalam dinamika masyarakat demokrasi modern, partai politik tidak hanya mengarahkan masyarakat untuk mencapai kekuasaan, namun harus seimbang dengan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Mengingat perkembangan partai politik saat ini telah menyebar luas hingga ke pelosok desa, yang tentunya sangat potensial untuk bersentuhan langsung dan memahami situasi dan kondisi masyarakat, terutama dalam mempercepat akselerasi serta kapasitas dalam memperbaiki kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya akan sejalan dengan pemikiran dari demokrasi itu sendiri yang bukan sekedar mengarahkan kekuasaan yang berasal dari rakyat, namun tentunya terwujudnya kemakmuran masyarakat

melalui peningkatan ekonomi, keadilan, sosial dan kultural.

Berdasarkan pada pandangan tersebut, maka partai politik sejatinya bukan sekedar menjual ideologi atau idealismenya yang sifatnya abstrak dan terkadang mengawang-awang, akan tetapi lebih pada memasarkan program yang lebih konkret, sederhana dan menyentuh setiap persoalan yang ada di masyarakat. Orientasi yang harus dikembangkan oleh partai politik, adalah lebih pada pemberian pelayanan sebagai bukti kemanfaatan atau keberpihakan terhadap masyarakat dan bukan sekedar untuk meraih simpati atau dukungan ketika menjelang pemilihan umum, namun lebih bersifat seterusnya (tidak terbatas waktu).

Dengan demikian partai politik dapat membuka kepekaannya, karena senantiasa memposisikan diri untuk berada di tengah masyarakat melalui aktivitas-aktivitas yang dirasakan dan dinilai memberikan manfaat. Seperti halnya melakukan pemecahan masalah atas persoalan yang sedang dihadapi masyarakat melalui forum dialog terbuka atas persolan banjir, sampah, pengangguran, kepemimpinan atau bahkan mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Disamping itu, partai politik juga dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat terkait dengan berbagai regulasi dan aturan tentang sistem kepartaian yang berlaku, sehingga dapat membuka

pengetahuan masyarakat untuk menjadi pemilih yang bertanggungjawab.

Melalui kegiatan yang bersifat kongkret tentunya partai politik keberadaannya akan senantiasa dirasakan oleh masyarakat, karena memiliki kepekaan sebagai suatu karakter yang dapat merekatkan kepercayaan terhadap masyarakat. Partai politik tidak lagi hanya dianggap sebagai kendaraan politik untuk meraih kekuasaan, namun dapat pula sebagai pemberi pelayanan terhadap kepentingan masyarakat yang terus ada (*eksis*) dalam berbagai situasi dan kondisi.

b. Penguatan Ideologi dan Struktur Partai Politik

Kehadiran partai politik dalam kehidupan masyarakat demokratis sebenarnya merupakan pelembagaan hak dasar politik masyarakat untuk mengakomodir kepentingan, nilai-nilai dan pendapat yang memperjuangkan keinginan atau cita-citanya (ideologi). Oleh karena itu, partai politik sangat berperan dalam menentukan kelanggengan sistem demokrasi dalam suatu negara. Partai politik memiliki peran yang sangat berbeda dengan organisasi-organisasi lain yang ada dimasyarakat. Maksudi (2015) menjelaskan bahwa organisasi partai politik bersifat formal atau resmi sebagai penyalur aspirasi politik masyarakat. Disamping itu, partai politik mempunyai tujuan politik, ialah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik bagi yang

belum berkuasa, tetapi bagi yang telah berkuasa tujuannya adalah mempertahankan kekuasaan dengan cara konstitusional.

Thomas Mayer dengan tegas menyatakan, partai politik menempati posisi sentral dibandingkan dengan organisasi-organisasi politik lainnya, ditinjau dari dua alasan sebagai berikut :

1. Hanya partai politik yang dapat menjalankan tugas untuk menciptakan program melalui kompromi yang berlaku untuk seluruh masyarakat.
2. Partai politik mempunyai tugas untuk melakukan perundingan dan untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan masyarakat dengan tindakan negara. (Rohaniah dan Efriza, 2015)

Penjelasan tersebut, semakin memperjelas mengenai posisi dan kedudukan partai politik serta bagaimana peranannya dalam sistem demokrasi, yaitu sebagai pengubung dan penerjemah nilai dan kepentingan masyarakat dari bawah ke atas sehingga nilai dan kepentingan masyarakat tersebut dapat dijadikan sebagai rancangan undang-undang negara, peraturan-peraturan yang mengikat, atau program-program bagi masyarakat. Oleh karena itu identitas dan jati diri partai politik merupakan pedoman utama yang dijadikan sebagai dasar atau spirit untuk melakukan perjuangan tersebut sebagai media

yang menghubungkan antara masyarakat dengan kekuasaan (negara).

Pandangan atas identitas dan jati diri partai politik secara umum dinyatakan sebagai nilai-nilai atau seperangkat ide yang menjadi karakter atau jiwa untuk dikembangkan dan disebarluaskan kepada masyarakat sehingga dapat membentuk suatu kekuatan sosial yang mengarah pada kesatuan politik. Setyaningrum (2005) menguraikan identitas selalu bersangkut-paut dengan apa-apa saja yang membuat sekelompok orang menjadi berbeda dengan yang lainnya, sehingga konstruksi perbedaan (*difference*) menjadi kata kunci untuk memahami identitas. Peterson (2003) dalam (Coutas, 2012) membahas formasi identitas mengaitkannya terhadap (ideologi) kebudayaan, adalah keniscayaan, mengingat kebudayaan dipahami sebagai sistem simbol yang didistribusikan secara luas.

Bertolak dari penjelasan tersebut, maka konsepsi atas identitas pada partai politik dapat dianalogikan sebagai ideologi. Surbakti (1999) memberikan pandangan tentang ideologi, adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh suatu masyarakat, dan mengenai cara-cara yang paling dianggap baik untuk mencapai tujuan. Tujuan dan cara itu secara moral paling baik dan adil penghayatannya untuk mengatur perilaku sosial warga masyarakat dalam pelbagai segi kehidupan. Lyman Tower Sargent

dalam Rohanian dan Efriza (2015) Ideologi dijelaskan sebagai sistem nilai atau sistem kepercayaan yang diterima secara nyata atau kebenarannya oleh suatu kelompok.

Kerangka ideologi pada partai politik dapat diidentifikasi sebagai asas atau sistem pemikiran yang dikonstruksikan untuk menciptakan pandangan, falsafah, cita-cita politik untuk dapat diaktualisasikan menjadi sebuah kepribadian atau jati diri.

Ideologi partai politik pada hakekatnya berasal dari ideologi politik yang merupakan suatu gagasan atau pemikiran untuk menguasai masyarakat secara luas. Robert L. Cord dalam Rohaniah dan Efriza (2015) mengartikan ideologi politik sebagai sistem kepercayaan yang memberikan penjelasan-penjelasan pembenar mengenai pentingnya keteraturan politik bagi masyarakat guna merefleksikan pencapaian tujuan yang diinginkan. Ideologi politik memiliki lima macam fungsi, yaitu : *Pertama*, etika bagi pelaksanaan kekuasaan/kewenangan negara; *Kedua*, asas yang harus diatati dan dipatuhi dalam pelaksanaan pemerintahan serta hubungan antara pemerintah dengan (rakyat) yang diperintah (jika terdapat penyimpangan dalam hal ini, maka ideologi dapat digunakan sebagai dasar untuk meluruskan penyimpangan itu); *Ketiga*, sebagai basis legitimasi politik, penuntun penentuan kebijakan dan tingkah laku politik; *Keempat*, membangkitkan persatuan massa dan menggerakannya untuk berbuat sesuatu

atau dengan kata lain, ideologi juga berfungsi sebagai alat untuk mengelola konflik maupun persatuan; dan *Kelima*, ideologi berfungsi sebagai tali pengikat gerakan-gerakan politik. (Rohaniah dan Efriza, 2015).

Melihat pada uraian di atas, menunjukkan betapa urgensinya ideologi dalam partai politik yang dilihat sebagai suatu mekanisme untuk mengatur pembentukan sikap terhadap suatu kejadian atau problema politik dan menentukan bagaimana tingkah laku atau perilaku untuk menghadapinya. Ideologi dalam partai politik dijabarkan kedalam *flatfom-flatfom* politik yang merupakan dasar untuk menentukan program-program umum yang bertujuan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat atau konstituen politik.

Beranjak dari hal tersebut, penataan kembali ideologi partai sebagai jati diri partai politik sejatinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang orientasinya bukan sekedar pada pencapaian kekuasaan yang disusun berdasarkan dogma-dogma yang cenderung melangit dan terkadang bersifat abstrak yang menekankan pada idealisme dan harapan-harapan tentang pencapain yang sulit diukur karena tidak berawal dari upaya untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Oleh sebab itu, kaitannya dengan mengembangkan sistem kepercayaan guna mengembalikan keberadaan partai politik sebagai institusi politik yang memiliki keberpihakan terhadap

masyarakat, sudah selayaknya ideologi partai politik lebih menekankan pada peran partai yang lebih kongkret dan dapat dirasakan secara langsung kemanfaatannya.

Transformasi ideologi partai politik dari persoalan kekuasaan yang mengandung makna dogmatik menjadi pemberi pelayanan terhadap masyarakat dengan menyentuh secara langsung realitas persoalan-persoalan yang bersifat kongkret dan mengedepankan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, tentunya akan menghasilkan peta perjalanan (*road map*) yang dapat menuntun partai politik menghasilkan aksi dan program nyata dalam menjawab apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat. Dengan demikian posisi partai politik akan lebih dikenali oleh masyarakat dan dirasakan kemanfaataanya yang bukan sekedar mencari dan mengumpulkan dukungan untuk meraih kekuasaan, namun memperhatikan aspek kebergunaan bagi masyarakat banyak, sehingga identitas partai politik lebih terlihat jelas, mengingat pola-pola pengembangan ideologinya dirasakan lebih kuat dan mengakar di masyarakat.

Disamping ideologi yang dianut oleh partai politik, terdapat hal yang sama pentingnya sebagai bagian dalam memperoleh kekuasaan politik, yaitu struktur partai politik. Selama ini struktur partai politik dibangun untuk menyusun pengalokasian dan penempatan sumber daya politik berdasarkan rekrutmen politik dan

sekaligus sebagai pemberian legitimasi bagi kader partai politik. Struktur partai politik sama dengan struktur organisasi lainnya, yang pada hekatnya kerangka yang mengatur hubungan antar individu dalam organisasi. Wijayanto (2012), menjelaskan struktur organisasi (*organization structure*) merupakan pengelompokan dan pengorganisasian aktivitas organisasi. Struktur organisasi merupakan perwujudan yang menunjukkan hubungan antara fungsi-fungsi dalam suatu organisasi serta wewenang dan tanggung jawab setiap anggota organisasi yang menjalankan masing-masing tugasnya. (Subkhi dan Jauhar, 2013).

Struktur partai politik yang menjadi fokus perhatian kedua setelah ideologi, hal ini didasari pemikiran bahwa struktur partai merupakan unsur yang memperkuat posisi kelembagaan partai politik (*interen*), karena disusun berdasarkan aktor-aktor politik yang terorganisir untuk menunjang dan mendukung *performance* partai politik dalam mewujudkan cita-cita masyarakat dan memperoleh kekuasaan. Pembentukan atau penyusunan struktur partai politik tentunya tidak terlepas dari proses rekrutmen politik sebagai salah satu fungsi partai politik, karena untuk memposisikan dan menyusun para kader partai yang berkualitas.

Menurut Surbakti (1999) rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan

sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

Fungsi rekrutmen politik yang dilakukan secara tepat dan profesional tentunya akan menciptakan sistem internal partai yang solid dan membentuk ikatan rasional dalam menjaga integritas partai politik. Surbakti (1999) menjelaskan fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Hal ini dipandang sebagai bagian yang sangat penting bagi kelangsungan sistem politik, sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Disisi lain, rekrutmen politik dapat memberikan suatu harapan bagi partai politik atas lahirnya kader-kader partai yang mempunyai kemampuan, kredibel dan kapabel untuk melanjutkan estafet kepemimpinan berdasarkan loyalitas, jati diri, tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan umum.

Oleh karena itu, agar menghindari terjadinya dis-fungsi partai politik sebagai akibat dari munculnya praktek-praktek manipulatif dalam rekrutmen politik yang dianggap bersebarangan dengan prinsip demokrasi, maka penataan struktur partai politik berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi, tentunya memberikan basis legitimasi bagi para anggota partai politik, karena memberikan kesempatan secara luas bagi setiap kader partai untuk berperan serta dalam mengelola organisasi partai

politik, terutama dalam mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat.

Struktur partai politik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap eksistensi partai disetiap pemilihan umum. Pembentukan dan penyusunan struktur partai politik berdasarkan distribusi keadilan, penciptaan pola-pola hubungan interpersonal yang bersifat etis dan humanis serta norma-norma kepatuhan, dan penghargaan bagi kader-kader partai yang berprestasi dipandang sebagai langkah strategis untuk membentuk kembali basis massa politik.

Mengingat selama ini banyak diantaranya partai politik yang mengalami perpecahan akibat perebutan kursi jabatan dalam struktur partai dan masuknya kelompok-kelompok memiliki modal secara finansial yang ingin merengkuh kekuasaan melalui partai politik serta munculnya aktor politik selaku elit partai yang memosisikan diri sebagai figur sentral (personalisasi) yang terkadang memicu perseteruan didalam tubuh internal partai politik itu sendiri. Akibat dari hal itu, dapat menyebabkan kelembagaan partai politik menjadi tidak stabil dan mengarah pada situasi tidak berfungsinya partai politik secara institusional, karena partai politik akan selalu tergantung pada sosok figur dan loyalitas anggota tidak dibangun berdasarkan ideologi partai namun cenderung lebih pada personalisasi dan kepentingan individu.

Kecenderungan tersebut perlu dibenahi agar eksistensi dan

kelembagaan partai politik tidak keluar dari norma-norma dan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat atas lembaga politik berkualitas yang ditunjukkan melalui penyusunan struktur partai politik berdasarkan rekrutmen dan kadersasi partai yang jelas. Proses seleksi anggota partai yang terstruktur dan mempunyai agenda secara terprogram, yang diarahkan untuk menghasilkan sumber daya kader yang berkualitas dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan perkembangan partai politik.

c. Penguatan Partai Politik Sebagai Media Akslerasi Politik Masyarakat

Paradigma partai politik dipandang sebagai suatu mesin politik yang hanya berorientasi untuk meraih dan menduduki kekuasaan tentunya telah banyak meninggalkan kesan negatif dimasyarakat, karena persoalan kekuasaan hanyalah merupakan logika pasif yang terkadang memosisikan masyarakat sebatas pemberi dukungan namun tidak diperhatikan dari aspek pemenuhan kebutuhan serta pemecahan pelbagai persoalan realitas yang selama ini dirasakan. Para elit partai politik yang telah berada pada kekuasaan baik dilevel eksekutif atau legislatif terjebak dengan stigma politik yang hanya berputar pada perebutan kursi jabatan dan konflik ideologis.

Fenomena seperti itu tentunya berimplikasi pada meningkatkan ketidakpercayaan publik atas partai

politik yang mengarah pada menurunnya fungsi representatif partai politik dalam pelaksanaan pemilihan umum. Masyarakat selalu dihadapkan dengan gambaran kekisruhan politik, sebagai akibat dari pertikaian kepentingan politik yang sering para elit politik tonjolan di dalam parlemen. Hal itu tentunya merupakan suatu indikasi dari peran dan fungsi partai politik yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Proses pendidikan politik, mediasi dan pencegahan konflik, hingga rekrutmen politik yang seharusnya mampu dikembangkan oleh partai politik agar dapat mencetak para kader partai yang berkualitas belum serta merta mampu ditunjukkan sebagai perwujudan institusi politik penyangga demokrasi yang strategis.

Seiring dengan situasi dan kondisi perkembangan partai politik saat ini, di mana simpati dan dukungan masyarakat merupakan faktor utama untuk mencapai syarat representatif sesuai ketetapan dari pemerintah agar mempunyai peluang untuk mengikuti pemilihan umum telah menimbulkan persaingan yang sangat ketat diantara partai politik dalam meraih dukungan dan membangun basis massa. Penerapan berbagai strategi untuk meraih dukungan dari mulai kampanye yang bersifat kompensional sampai dengan penggunaan media informasi dalam menawarkan ideologinya ke tengah masyarakat telah membuka peluang yang sangat besar bagi partai politik untuk mengembangkan jaringannya ke setiap pelosok negeri.

Berdasarkan pada hal itu, sudah saatnya partai politik mulai merubah arah haluan dan sudut pandangnya dengan membiasakan diri untuk mengadapi persoalan-persoalan normatif dan bersentuhan langsung dengan persoalan kehidupan masyarakat. Partai politik harus mampu mengedepankan visi, misi atau program yang mampu menjawab tuntutan dan aspirasi dari masyarakat. Untuk itu, partai politik perlu melakukan upaya penguatan kapasitas baik secara internal maupun eksternal sebagai upaya merevitalisasi partai politik.

Selanjutnya, dalam rangka penguatan kapasitas partai politik, dapat ditempuh dengan beberapa pendekatan, yang diantaranya meliputi:

1. Pemberdayaan partai politik;

Selama ini konsep pemberdayaan identik dengan penguatan kapasitas, perbaikan atau pada segala hal yang mengarah untuk peringkatan dari sesuatu yang diaanggap lemah menjadi lebih berguna atau memiliki kekuatan secara kualitas dengan cara yang rasional.

Konsepsi dalam pemberdayaan partai politik menekankan pada komitmen dan kesungguhan partai sebagai sebuah lembaga politik yang mengemban amanat rakyat dan bertanggungjawab atas pembangunan politik di masyarakat. Partai politik harus menyadari bahwa keberadaanya itu, merupakan bagian dari integral suatu masyarakat. Artinya setiap gerak dan langkah yang dilakukan oleh partai

politik memang ditunjukkan untuk menciptakan kemaslahatan dan perubahan yang lebih baik dan bukan hanya pada sistem politik tapi meliputi keseluruhan bagian yang ada dimasyarakat.

Komitmen yang jelas dan tegas dari suatu partai politik akan terlihat ketika peran dan fungsi partai dapat dilaksanakan oleh semua anggota dan kader sebagai kerangka utama dalam membentuk kekuasaan yang bersumber dari rakyat. Karena dengan diawali dari pelaksanaan peran dan fungsi partai yang sesuai amanah demokrasi, akan membangun kembali citra partai politik di mata masyarakat sebagai suatu organisasi pendidik dan pemberdaya masyarakat. Budiarmo (2008) mengungkapkan fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengantar konflik.

Komitmen dari partai politik akan merupakan bukti kongkret bahwa partai politik tidak sekedar kendaraan politik untuk mencapai kekuasaan bagi para elit partai dan hanya hidup ketika menghadapi pemilihan umum. Akan tetapi menjadi suatu proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan dengan merefleksi diri untuk mendorong praktik-praktik demokrasi melalui serangkaian program inovasi sosial yang langsung menasar dan berhubungan dengan masyarakat. Partai politik tidak lagi menawarkan dan menjual ideologi untuk memperoleh dukungan dan keniscayaan dari publik, namun lebih

pada penciptaan kontrak sosial antara partai politik dengan masyarakat, sehingga terjadi simbiosis yang saling menguntungkan.

Partai politik bukan sekedar simbol demokrasi, yang kerap menjadikan rakyat sebagai alasan untuk mewujudkan kekuasaan melalui mekanisme pemilihan umum, sementara dalam internal partai politik itu sendiri tidak menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, karena lebih banyak tergantung pada kemauan (*godwill*) dari pimpinan. Maka secara prinsipil hal itu bertolak belakang dengan prinsip demokrasi yang selama ini dijadikan sebagai parameter untuk membangun sistem politik. Kesan yang seperti ini, justru memperlihatkan konsep *mercusuar*, yang lebih menekankan opsifikasi keluar agar seolah terlihat demokratis, namun sebenarnya praktek-praktek didalam tubuh partai politik itu sendiri tidak mampu mencerminkan demokrasi yang sesungguhnya, dan bahkan tidak jarang menunjukkan pertentangan yang mengarah pada perpecahan.

Beranjak dari hal itu, akan sangat rasional apabila pemberdayaan partai politik yang menghendaki peran dan fungsi partai politik tidak sekedar merelokasi kekuasaan dari rakyat, tetapi mengedepankan pula realisasi perbaikan internal partai dan kondisi sosial masyarakat agar dapat memupuk kesadaran politik masyarakat dan membuat masyarakat semakin cerdas untuk menyikapi setiap dinamika politik berdasarkan rasa kebangsaan

dan untuk menjaga kesatuan dan persatuan negara.

2. Keterbukaan akses informasi politik;

Pada dasarnya organisasi partai politik merupakan media untuk menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat, terutama dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini partai politik bertindak sebagai pemberi informasi bagi masyarakat terhadap hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas politik. Informasi politik merupakan hal yang sangat penting dalam lingkungan masyarakat demokratis, mengingat keterbukaan dan kemudahan masyarakat untuk menerima dan memperoleh informasi merupakan salah satu hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam proses pemberdayaan politik, keterbukaan atas akses informasi politik bagi masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan dalam menjamin terselenggarakannya proses politik agar bersifat objektif. Oleh sebab itu, partai politik sebagai sebuah lembaga politik yang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung, memegang peranan strategis dalam membuka pemikiran dan pandangan masyarakat berdasarkan pemberian informasi yang berkualitas, teruji dan diandalkan. Partai politik memainkan peranannya sebagai sumber informasi yang membantu masyarakat dalam mengolah dan menganalisa setiap keputusan politik

yang benar-benar akurat dan terpercaya tanpa terdistorsi oleh kepentingan sepihak yang sarat akan manipulasi, kebohongan, propaganda dan bersifat bias tanpa memiliki esensi permasalahan yang ditunjang oleh fakta serta data yang otentik.

Keterbukaan atas informasi politik bagi masyarakat akan sangat membantu dalam meningkatkan transparansi atas aktivitas dan perilaku politik dari para elit partai agar selalu menunjukkan kesesuaian dengan amanat yang telah dibebankan dan dipercayakan dari rakyat. Masyarakat dalam hal ini, akan merasa diberitahu bahwa aspirasi dan harapan-harapan atas terwujudnya suatu situasi dan kondisi yang diidamkan telah benar-benar diperjuangkan oleh para wakilnya yang berada di kekuasaan. Selain dari itu, dengan adanya kemudahan masyarakat untuk mengakses atau menerima informasi politik melalui media partai politik, pada hekekatnya merupakan bentuk dari pendidikan politik bagi masyarakat dalam membentuk perilaku politik yang cerdas. Kantaprawira (2004) mengartikan pendidikan politik sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.

Disisi lain, adanya partisipasi politik aktif dari masyarakat dalam membangun dan membentuk kehidupan politik, sangat tergantung dari keterbukaan dan kemudahan dalam memperoleh informasi politik. Karena

pada hakekatnya pemberian informasi politik yang relevan dan akurat akan membuka pandangan masyarakat tentang demokrasi dan menjadikan masyarakat memahami posisinya sebagai warga negara. Namun secara lebih jelasnya, partisipasi politik dapat dipahami sebagai pembentukan komunikasi dua arah sebagai dialog yang merupakan perwujudan masyarakat yang berdaulat.

Dengan demikian keterbukaan atas akses informasi yang diberikan oleh partai politik bagi masyarakat, dapat berpeluang dalam membangun iklim dan suasana dalam menjamin aktivitas politik yang berkelanjutan. Sebab partai politik menempatkan peran dan fungsinya pada hal yang lebih memberikan kontribusi secara langsung, tidak sekedar sebagai media penghubungan antara masyarakat dengan negara. Tetapi wujud partai politik menjadi penyedia jasa yang menghasilkan produk politik yang bermanfaat dan bersifat lebih kongkret untuk mewujudkan agenda-agenda kemanusiaan dan norma-norma sosial yang sesuai dengan harapan dari masyarakat. Karena pada prinsipnya partai politik yang dibutuhkan ditengah masyarakat yang sedang mengalami penurunan kepercayaan, adalah partai politik yang memiliki serangkaian program nyata sebagai bentuk jawaban atas tuntutan demokrasi yang sebenarnya. Terutama untuk terpenuhinya kebutuhan dasar dari sistem politik berupa terciptanya keadilan, kesejahteraan, kesetaraan

baik secara hukum, politik, ekonomi, dan sosial.

C. Penutup

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mewujudkan institusi partai politik yang benar-benar memiliki kualitas dan kapasitas legitimasi di masyarakat sebagai media yang menyalurkan dan menyuarakan tuntutan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, merupakan suatu pilihan disaat tingginya ketidakpercayaan publik atas partai politik. Partai politik sebagai instrumen demokrasi modern jangan sampai terjebak oleh situasi de-institusionalisasi, yang justru akan berdampak buruk pada perkembangan demokrasi dan keyakinan masyarakat atas pilihannya.

Peningkatan peran dan fungsi partai politik dengan melakukan penyesuaian dengan kepentingan masyarakat yang bersifat kongkret, akan merubah pandangan masyarakat atas partai politik dari sebuah institusi yang terkesan tertutup, eksklusif dan berorientasi hanya pada kekuasaan, menjadi sebuah organisasi milik rakyat yang lebih dinamis, bersifat terbuka dan berorientasi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Tentunya hal ini, dapat dijadikan sebagai suatu strategi dalam mendorong partai politik agar lebih responsif terhadap kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang berasal dari masyarakat. Selan dari itu, pembenahan dalam internal

partai politik untuk mensinergikan antara visi, misi dan tujuan dengan kepentingan anggota partai sebagai bentuk penguatan partai politik sebagai organisasi yang dibangun atas adanya kaderisasi.

Dengan demikian pandangan tentang partai politik sebagai pilar dari demokrasi pada suatu negara akan benar-benar terwujud, sebab partai politik dalam membangun kehidupan masyarakat yang demokratis tidak hanya dalam kerangka parsial, yaitu dipahami oleh masyarakat sebatas merebut, mempertahankan dan menjalankan kekuasaan yang dilakukan melalui pemilihan umum. Melainkan bersifat holistik dan menyeluruh yang menandakan sebagai sebuah institusi yang mampu melakukan perubahan secara komprehensi dan simultan atas kehidupan masyarakat yang mengarah pada tercapainya keadilan, kesejahteraan dan ketertiban sosial.

Daftar Pustaka

a. Buku-Buku

- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kantaprawira, Rusadi. (2004). *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- Rohaniah, Yoyoh & Erlita. (2015). *Pengantar ilmu politik, Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Intras Publishing, Malang.
- Sahid, Komarudin. (2011). *Sosiologi Politik*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Subkhi, Akhmad & Jauhar, Mohammad. (2013). *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Surbakti, Ramlah, (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana, Jakarta.

Wijayanto, Dian. (2012). *Pengantar Manajemen*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

b. Jurnal

- Setyaningrum, Arie. 2005. "Memetakan Lokasi bagi 'Politik Identitas' dalam Wacana Politik Poskolonial". *Jurnal Mandatory Politik Perlawanan*. Edisi 2/ Tahun 2/ 2005, hal. 19.